

KONTRIBUSI KEPEMIMPINAN DALAM MENUNJANG LITERASI DIGITAL BIDANG PENDIDIKAN DI DAERAH

Junaidin Basri^a , Didin Nurdin^b , Irma Indriyani^c , Arif Bakhtiar^d

^a Pendidikan Agama Islam, STAI Al-Musaddadiyah Garut, Indonesia

^b Administrasi Pendidikan, Program Pascasarjana, Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia

^c Mahasiswa Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Uiniversitas Islam Negeri Bandung, Indonesia

^d Mahasiswa Ilmu Manajemen, Program Pascasarjana, Uiniversitas Garut, Indonesia

*Junaidin Basri: Garut, Jawa Barat, 44112, Indonesia. E-mail addresses: junaidin.basri@stai-musaddadiyah.ac.id

Article History	
Received: 15 – 01 - 2022	Received in revised form: 21 – 04 - 2022
Accepted: 25 – 01 – 2022	Available online: 25 – 06 – 2022

Abstrak: Penelitian ini di dasari oleh dua masalah pokok yakni berkembangnya teknologi literasi digital dan pemanfaatannya serta kontribusi kepemimpinan daerah dalam menyediakan komponen teknis dan non teknis dalam bidang pendidikan. Metode yang digunakan untuk mengungkapkan gambaran yang sesungguhnya tentang kontribusi kepemimpinan dalam mewujudkan literasi digital bidang pendidikan adalah kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa; Pertama, Literasi Digital menjadi instrumen baru dalam memajukan masyarakat melalui pendidikan sebagai kunci dalam pembangunan indeks manusia. Kedua, Kepemimpinan daerah memiliki kewajiban untuk menyediakan fasilitas literasi digital baik aspek teknis maupun non teknis agar masyarakat pendidikan dapat menggunakan dengan murah, mudah, cepat, efektif, efisien dan berkelanjutan Ketiga, Kepemimpinan daerah diwajibkan mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20 persen untuk mendukung penyediaan dan pengembangan fasilitas teknis maupun non teknis pendidikan.

Kata kunci: Kepemimpinan, Literasi, Digital, Pendidikan

Abstract: This research is based on two main problems, namely the development of digital literacy technology and its use as well as the contribution of regional leadership in providing technical and non-technical components in the field of education. The method used to reveal the true picture of the contribution of leadership in realizing digital literacy in education is qualitative with a phenomenological approach. The results of the study concluded that; First, Digital Literacy is a new instrument in advancing society through education as the key in building the human index. Second, regional leadership has an obligation to provide digital literacy facilities, both technical and non-technical aspects so that the educational community can use it cheaply, easily, quickly, effectively, efficiently and sustainably. Third, regional leadership is required to allocate an education budget of 20 percent to support the provision and development technical and non-technical educational facilities.

Keywords: Leadership, Literacy, Digital, Education

PENDAHULUAN

Kepemimpinan memiliki peranan yang sangat strategis dalam mengelola organisasi, mulai dari bentuk yang terkecil hingga pada ruang lingkup yang lebih besar dalam mempengaruhi orang lain dan pengikutnya guna mencapai tujuan yang direncanakan. Sedangkan organisasi adalah sarana atau alat yang digunakan oleh pemimpin dalam

mengatur unsur-unsur terpenting pada visi, misi dan tujuan yang diharapkan melalui program kerja secara efektif dan efisien.

Organisasi pemerintah daerah merupakan bagian dari sistem penyelenggaraan pemerintah yang lebih kecil dari sistem pemerintahan di Indonesia mulai dari tingkat propinsi dan bagian dari propinsi adalah pemerintahan kabupaten dan kota. Menurut UU No.23 tentang Pemerintahan Daerah tahun 2014 memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan dasar masyarakat dalam bidang; pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan tata ruang, perumahan dan kawasan pemukiman, ketentraman umum dan perlindungan masyarakat, sosial masyarakat, serta penyediaan komunikasi dan informatika. Pembangunan komunikasi dan informatika di daerah, merupakan salah satu persyaratan penting untuk menunjang program pembangunan yang berkelanjutan, yang lebih cepat, tepat, efektif dan efisien, melalui penyediaan fasilitas teknologi digital.

Berbagai hasil penelitian terdahulu terkait fungsi dan manfaat dari teknologi digital antarlain yang oleh (Danuri, 2019) “saat ini setiap individu sudah memanfaatkan teknologi digital dengan alasan lebih dipermudah mulai dari komunikasi, informasi, transaksi, edukasi, hiburan, dan kebutuhan pribadi dengan lebih cepat, efektif dan efisien”. Hasil penelitian yang sama juga disampaikan oleh (Restianty, 2018) bahwa “teknologi berbasis digital sudah merubah masa depan negara-negara maju seperti; USA, Australia, RRC, Uni Emirat Arab dan India, demikian juga yang sedang terjadi di Indonesia”. Selanjutnya hasil penelitian yang dilakukan oleh (Setiawan, 2018) yaitu “perkembangan trend bisnis berbasis e_commerce di Indonesia sangat pesat”, demikian juga yang terjadi dalam bidang pendidikan, dimana digital telah membantu kepala sekolah dan guru dapat meningkatkan motivasi dan prestasi siswa melalui pembelajaran dari rumah (Slamet, et al., 2021).

Mencermati isu strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Garut 2015-2020, secara tegas belum menempatkan Literasi Digital sebagai isu strategis yang menjadi prioritas keberlanjutan mutu pendidikan di daerah, yang berdampak terhadap peningkatan kinerja guru melalui proses pembelajaran yang aktif menggunakan fasilitas digital (pembelajaran online) yang dimiliki oleh sekolah sehingga terjadi proses belajar yang menyenangkan antara guru dengan siswa. Faktanya di berbagai daerah khususnya saat pandemic Covid-19 antara (2020-2021) lalu masih ditemukan adanya tuntutan dari masyarakat yang mewakili orang tua siswa agar menggelar belajar tatap muka (PBTM) dengan alasan faktor teknis dan non teknis pembelajaran daring belum mendukung.

Terkait dengan penyediaan layanan teknologi informatika dan program digitalisasi di Kabupaten Garut, dengan mengacu pada data BPS (2020) Kabupaten Garut sudah mendapatkan sinyal internet telepon selular di pedesaan dengan kapasitas (356) 4G/LTE, (27) 3G/H/H+/EVD dan (3) 2.5G/E/GPRS (Kuswardani, 2021)

Tabel 1. Desa Kabupaten Penerima Sinyal Internet dan Telepon di Jawa Barat

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	4G/LTE	3G/H/H+/ EVDO	2,5G/E/ GPRS	Tidak ada None
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kabupaten/ Regency				
Bogor	386	49	—	—
Sukabumi	289	82	13	1
Cianjur	288	62	8	—
Bandung	270	10	—	—
Garut	356	78	3	—
Tasikmalaya	270	73	3	3

Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa wilayah kota dan desa di kabupaten Garut telah terlayani internet dan telepon seluler. Berdasarkan keterangan Kadis Diskominfo Kab. Garut bahwa di tahun 2021 Infrastruktur jaringan internet sudah terlayani di 42 kecamatan dan 442 desa, sedangkan pada aspek Layanan Akses Internetnya pada tahun 2022 nanti akan di serahkan pengelolanya ke Desa karena semua Desa sudah ada alokasi anggaran SID (Sistem Informasi Desa).

Atas berbagai kesenjangan yang terjadi antara kemanfaatan kehadiran *literasi digital* dengan respon masyarakat terhadap penggunaan teknologi *digital* menjadi sangat penting untuk dilakukan penelitian dengan fokus utamanya adalah kontribusi kepemimpinan dalam menunjang penggunaan literasi digital dan pemanfaatannya terhadap bidang pendidikan di daerah. Adapun yang tujuan dari penelitian antaralain; (1) apa yang dimaksud dengan *literasi digital*, (2) apa saja manfaat penting dari *literasi digital* dan (3) upaya yang dilakukan oleh kepemimpinan daerah dalam mendukung *literasi digital* bidang pendidikan di Kabupaten Garut

METODE PENELITIAN

Untuk mengungkapkan kondisi yang sebenarnya terjadi terkait penyediaan *infrastruktur* dan *suprastruktur* fasilitas pendukung *literacy digital* di Kabupaten Garut, maka metode yang digunakan oleh peneliti adalah kualitatif. Data peroleh melalui observasi dan wawancara terhadap pihak yang berkepentingan secara mendalam, kemudian dikaji dokumen pendukung yang diperoleh, selanjutnya seluruh naskah hasil wawancara, observasi dan dokumen tersebut di analisis menggunakan pendekatan *tringual* sehingga menjadi naskah hasil penelitian lapangan yang utuh, kemudian seluruh temuan data tersebut dilakukan konfirmasi kembali pada *stakeholder* dimaksud.

Data hasil penelitian diseminarkan dengan melibatkan para pakar, pengguna dan pelaksana kebijakan. Hasil dari seminar tersebut di buatkan menjadi laporan penelitian dan terakhir dipublikasikan.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Renstra Kabupaten Garut khusus dalam isu peningkatan mutu sumber daya manusia melalui capaian Index Pengembangan Manusia (IPM) atau Human Development Report (HDR) Kabupaten Garut mengalami pertumbuhan bila dilihat dari grafik pencapaian IPM pada tahun 2019 sebesar (66,22 %) dengan rasio pertumbuhan sejak tahun 2012 (61,04), 2013 (61,67), 2014 (62,23), 2015 (63,21), 2016 (63,64), 2017 (64,52), 2018 (65,42) dan 2019 (66,22). Selain itu usia harapan hidup masyarakat Garut saat lahir (71, 22) tahun, rata-rata lama sekolah (7,51) tahun dan harapan lama sekolah (11,82) tahun serta pengeluaran perkapita pertahun yang disesuaikan sebesar Rp. 8.099 ribu. Pertumbuhan

IPM Kabupaten Garut sejak tahun 2016 sampai 2020 bila dibandingkan dengan kabupaten dan kota lainnya di Propinsi Jawa Barat menempati urutan ke 25 dari 27 kabupaten dan kota atau ranking ketiga dari bawah setelah Kabupaten Cianjur dan Tasimalaya (Yusuf, 2021).

Mengacu pada dokumen program prioritas RKPD tahun 2020-2021 pada bidang pemerintahan dan kemasyarakatan dari Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Garut tahun 2019 telah menetapkan visi RPJMD 2019-2024 “Garut yang Bertakwa, Maju dan Sejahtera” dengan Misinya: (1) mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang agamis, sehat, cerdas dan berbudaya, (2) mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintah daerah yang baik dan bersih, (3) mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan serta kemantapan infrastruktur sesuai daya dukung dan fungsi ruang. Adapun yang menjadi tujuan dan sasarannya adalah: (1) meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing dari berbudaya luhur, (2) meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, (3) meningkatkan penyediaan infrastuktur dasar secara merata yang mampu mendorong percepatan ekonomi, sosial dan budaya. Untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan 4 sasaran dan 16 indikator kinerja tersebut, dibutuhkan 13 strategi dan kebijakan, 56 arah kebijakan, 13 program janji kampanye, 37 program pembangunan dan 79 kegiatan program prioritas (Anon., 2019).

Pada aspek prioritas pembangunan daerah peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan, ditemukan adanya program pengembangan inovasi pelayanan publik berkelanjutan dengan menerapkan inovasi (one agenci one inovation) serta penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik yang memadai.

Fakta pertumbuhan IPM di atas menunjukkan bahwa ada tiga faktor mendasar yang saling mempengaruhi pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Garut, yaitu; faktor pendapatan perkapita dan daya beli yang rendah yakni sebesar (8.099 ribu/bulan), hal tersebut sangat berpengaruh terhadap motivasi dan keinginan siswa untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Oleh karena tidak berlebihan bila angka harapan lama sekolah di Kabupaten Garut baru mencapai angka (7,51-11,82), dan terakhir adalah usia harapan hidup sejak lahir (71,22) tahun.

Berdasarkan tiga masalah fundamental tersebut di atas, bila mengkaji strategi peningkatan IPM sektor pendidikan di Kabupaten Garut secara umum lebih terkonsentrasi pada penyediaan fasilitas dasar pendidikan, antarlain: mendorong pendidikan masyarakat berkelanjutan dengan memperkecil angka putus sekolah, mendekatkan pendidikan dengan masyarakat terpencil, menyekolahkan satu siswa miskin satu desa ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, mengurangi angka putus sekolah, penjaminan lembaga pendidikan pada jenjang tertentu yang kredibel dan terakhir merangsang anak berprestasi dari kalangan penduduk yang kurang mampu

PEMBAHASAN

Literasi pada dasarnya adalah kemampuan membaca dan menulis. Tokoh yang pertama kali memperkenalkan konsep *Literasi Digital* adalah *Paul Gilster* pada 1997,

yang mendefinisikan *literasi digital* sebagai kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi yang bersumber dari *digital* (Bawden, 2008) dalam (Akhirfiarta, 2017). Namun secara terminologi, Bawden (2008) berpendapat bahwa konsep *literasi digital* hampir membingungkan karena berada dalam topik Literasi Informasi, Literasi Komputer, literasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), e-literacy, Literasi Jaringan, dan Literasi Media.

Sementara itu Martin (2005) dalam (Restianty, 2018) mendefinisikan *literasi digital* sebagai kesadaran, sikap dan kemampuan mengidentifikasi, mengakses, mengelola, mengintegrasikan, mengevaluasi, menganalisis alat dan fasilitas digital dengan efektif untuk menghasilkan pengetahuan baru berkomunikasi, bahkan mengonstruksikan aksi sosial. Sedangkan UNESCO mengusulkan definisi *literasi digital* sebagai kemampuan mengakses, mengelola, memahami, mengintegrasikan, mengevaluasi, berkomunikasi dan membuat informasi baru secara aman dan tepat melalui teknologi digital (Romansyah, 2017).

Berbagai pandangan di atas memberikan gambaran bahwa kehadiran *Literasi Digital* sesungguhnya mencakup dua komponen utama yakni terkait aspek teknis dan non teknis. Aspek teknis merupakan kemampuan operasional dalam menggunakan alat, baik itu peranti keras maupun peranti lunak. Sementara, aspek non-teknis lebih menitikberatkan pada dimensi pengetahuan yang dibutuhkan serta perilaku sebagai dampak dari proses teknis tersebut.

Kendatipun para ilmuwan berbeda pandangan terkait operasionalisasi aspek teknis dan non teknis dalam *literasi digital*, diantaranya; *van Deursen dan van Dijk* (2009) yang membuat kerangka pengukuran literasi digital yang terdiri dari: keahlian operasional; keahlian formal; keahlian informasi; keahlian strategis. Sementara *Cartelli* (2010) menyusun kerangka *literasi digital* terdiri dari dimensi teknologi; domain kognisi; etika atau hubungan sosial. Berbeda halnya dengan pendapat *Techataweewan and Prasertsin* (2018) mengajukan kerangka *literasi digital* yang terdiri dari: (1) keahlian operasional (kognisi, penemuan atau *invention*, dan penyajian atau presentasi); (2) keahlian berpikir (Analisis, Evaluasi, dan Kreativitas); (3) keahlian kolaborasi (kerja tim, jejaring, dan berbagi atau sharing); (4) keahlian kesadaran (Etika, hukum, dan perlindungan diri atau safeguarding self (Rumata & Nugraha, 2020).

Pandangan berbeda juga di sampaikan oleh UNESCO tentang kerangka literasi digital meliputi tiga komponen, yaitu wawasan (knowledge), keterampilan (skills), dan perilaku (attitude) (Law et al., 2018). Ketiga komponen kompetensi *literasi digital* tersebut mengadopsi pengembangan kompetensi yang digagas oleh Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) dalam “OECD Future of Education and Skills 2030” (OECD, 2018). Komponen *knowledge* meliputi; pengetahuan yang bersifat disiplin, epistemik, dan procedural (Park, 2019).

Banyak negara telah mengadopsi kerangka literasi digital yang dikembangkan oleh sektor swasta (komersial) untuk meningkatkan kapasitas literasi digital baik itu di level nasional, lokal, bahkan institusi pemerintahan sekalipun. UNESCO

menyebutkan ada sedikitnya tiga kerangka *literasi digital* milik swasta atau komersial yang diadopsi di beberapa negara yaitu: *International Computer Drivers Licence* (ICDL); *Certiport Internet and Computing Core Certification* (IC3); dan *Microsoft Digital Literacy Standard Curriculum*. Indonesia sendiri termasuk negara yang mengadopsi dua dari kerangka tersebut, selain Kolombia, Mesir, dan Qatar (Law et al., 2018) dalam (Rumata & Nugraha, 2020). UNESCO juga menggagas sebuah kerangka kompetensi literasi digital global.

Tabel 2. Kerangka Literasi Digital UNESCO

No	Area Kompetensi	Kompetensi
1	Pengetahuan dasar terkait <i>hardware</i> dan <i>software</i>	Pengetahuan dasar peranti keras dan lunak seperti menyalakan komputer, membuat <i>password</i> , <i>account</i> , mengetahui cara <i>log in</i>
2	Literasi Informasi dan Data	Dapat mencari informasi dengan <i>search engine</i> , mencari data, informasi atau konten digital relevan lainnya; serta mengelola dan mengevaluasi data, informasi dan konten digital lainnya
3	Komunikasi dan Kolaborasi	Berinteraksi, membagikan (<i>share</i>), berpartisipasi, berkolaborasi melalui teknologi digital; mengetahui etika dalam ber-internet (<i>netiquette</i>); serta mengelola identitas digital
4	Kreasi Konten Digital	Mengembangkan konten digital; Integrasi dan elaborasi konten digital; Hak cipta dan lisensi; serta <i>Programming</i>
5	Keamanan	Melindungi gawai; Melindungi data pribadi; Melindungi kesehatan dan kesejahteraan; Melindungi lingkungan
6	<i>Problem Solving</i>	Solusi masalah teknis; Mengidentifikasi kebutuhan dan respons teknologi; Menggunakan teknologi digital dengan kreatif; Mengidentifikasi kesenjangan kompetensi digital
7	Kompetensi yang berkaitan dengan karir atau pekerjaan	Pengetahuan dan kemampuan yang dibutuhkan untuk mengoperasikan peranti keras atau lunak yang spesifik untuk mendukung pekerjaan tertentu seperti program <i>software</i> desain untuk bidang teknik atau rekayasa, <i>e-learning</i> dan sebagainya

Sumber : Law et al. 2018

Sementara itu Kemenpan RB memberikan definisi komponen yang berbeda, antaralain: (1) Wawasan Digital ASN yang berarti pengetahuan dan pemahaman ASN mengenai teknologi digital, termasuk implikasi dan konsekuensinya terhadap tugas dan fungsinya. (2) Keterampilan Digital ASN yang merupakan kemampuan ASN dalam memanfaatkan teknologi digital sebagai penunjang aktivitas kerja. (3) Perilaku Digital ASN yakni adalah kesadaran ASN dalam memanfaatkan teknologi digital secara bertanggung jawab dan bijaksana.

Terkait dengan tuntutan akan teknologi *Literasi Digital* yang sedang menjadi primadona termutakhir ini, pemerintah daerah seyogyanya sudah mempersiapkan dan menyediakan seluruh kebutuhan layanan Literasi Digital, mulai dari aspek struktur, infrastruktur maupun budayanya.

Aspek Ketersediaan Infrastruktur

Mengacu pada data Garut dalam angka dan Jabar dalam angka tahun 2020, serta hasil wawancara dengan kadis diskominfo Kab. Garut menyatakan; bahwa aspek ketersediaan infrastruktur dan supra struktur untuk layanan internet sudah terkoneksi di 441 desa dan 21 kelurahan melalui system jaringan *Fiber Optik* maupun *Wareless*. Fakta tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Garut sudah sungguh-sungguh dan siap beradaptasi dengan budaya baru yakni dunia internet dan literasi digital.

Selain ketersediaan layanan internet di seluruh wilayah administrasi Kab. Garut, Pemerintah Garut saat ini sedang mencanangkan program *Garment and Gacor. Garmen*

adalah disingkat dari (Garut Merdeka Internet), sedangkan *Gacor* adalah singkatan dari (Garut Caang Informasi). Kedua program ini di khususkan pada layanan gratis internet di seluruh kantor desa yang tersebar di Kabupaten Garut. Selanjutnya pada tahun 2022 ini ditegaskan oleh pihak Diskominfo sedang berupaya mengajukan usulan Ke BAKTI KemenKoinfo sebanyak 800 Titik untuk satuan pendidikan desa (sekolah formal) dan fasilitas umum layanan kesehatan.

Aspek Teknis dan Non Teknis

Selain penguatan aspek infrastruktur dan suprastruktur yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menyediakan layanan bagi masyarakat, yang tak kala lebih pentingnya adalah kemampuan para pengguna layanan *literasi digital* dalam aspek teknis maupun non teknis, sehingga dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap kepentingan masyarakat seluas-luasnya, baik pemerintah, swasta dan dunia pendidikan.

Aspek teknis merupakan salah satu komponen bagi pengguna layanan *jasa literasi digital* agar dalam mengoperasional teknologinya baik peralatan peranti keras maupun peranti lunak dapat diperoleh dengan mudah, murah dan dapat dilakukan oleh SDM yang terlatih dan terdidik di bidangnya. Sementara, aspek non-teknis lebih menitikberatkan pada dimensi pengetahuan yang dibutuhkan serta perilaku sebagai dampak dari proses teknis tersebut.

Mengacu pada pandangan *Techataweewan and Prasertsin* (2018) bahwa yang termasuk dalam kompetensi non teknis dalam *literasi digital* antarlain mencakup: (1) keahlian operasional (kognisi, penemuan atau invention, dan penyajian atau presentasi); (2) keahlian berpikir (Analisis, Evaluasi, dan Kreativitas); (3) keahlian kolaborasi (kerja tim, jejaring, dan berbagi atau sharing); (4) keahlian kesadaran (Etika, hukum, dan perlindungan diri atau safeguarding self).

Kemenkoinfo melalui program *literasi digital* yang berkerjasama dengan pemda Kab/Kota di seluruh Indonesia, secara khusus mengembangkan *Gerakan Literasi* dengan mengkonsentrasikan pada 4 (empat) kompetensi, yaitu; *skill/knowledge*, budaya, etika dan keamanan digital. Gerakan nasional ini secara massif dilakukan oleh pemerintah daerah yang bekerjasama dengan berbagai *stakeholder* diantaranya membentuk jejaring yang disebut komunitas relawan TIK, yang anggotanya berasal dari unsur Perguruan Tinggi, Pers, LSM, Ormas, Toga, Toma, pelajar, dll. Hampir setiap minggu menyelenggarakan kegiatan webinar dengan menghadirkan berbagai narasumber dari berbagai profesi baik sebagai teknisi digital, pengguna digital (pengusaha, pelaku industry dan Lembaga pendidikan) hingga masyarakat umum.

Jadi dengan mengacu pada konsep yang dikembangkan oleh UNESCO, sesungguhnya dalam memperkuat dan mengembangkan *literasi digital* di daerah sudah memenuhi 3 (tiga) komponen penting, yaitu telah berorientasi pada aspek penguatan dan pengembangan wawasan (*knowledge*), keterampilan (*skills*), dan perilaku (*attitude*) (Law et al., 2018). Selain itu konsep yang dikembangkan oleh UNESCO tersebut sejalan dengan komponen kompetensi *literasi digital* yang dikembangkan oleh Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi(OECD) dalam *OECD Future of Education and*

Skills 2030 yang meliputi; aspek *knowledge* terdiri dari; pengetahuan yang bersifat disiplin, epistemik, dan procedural (Park, 2019).

Oleh karena itu walaupun *literasi digital* kehadirannya masih bayi, namun dalam faktanya, pemerintah daerah Garut telah mempersiapkan secara optimal, baik dalam aspek kesiapan infrastruktur, aspek teknis hingga non teknis bagi kemanfaatan yang diperuntukkan seluas-luasnya bagi kepentingan masyarakat di daerah.

Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah yang Berdaya Saing

Menyiapkan sumber daya manusia yang unggul menjadi cita-cita pemerintah daerah, hal tersebut logis karena dengan SDM yang unggul akan sangat mudah mendayagunakan potensi sumber daya alam yang dimiliki, serta kehadiran teknologi yang terbarukan, sehingga capaian Index Pengembangan Manusia (IPM) atau Human Development Report (HDR) Kabupaten Garut dari yang terendah ke tiga dari 27 Kab/Kota di Jawa Barat akan mengalami perubahan dan pertumbuhan yang cepat. Investasi SDM yang unggul melalui bidang pendidikan menjadi pilihan prioritas utama amanah konstitusi yang mengharuskan pemerintah untuk mengalokasikan 20 persen anggaran dari APBN dan APBD Kab/Kota untuk bidang pendidikan.

Mencermati Renstra Disdik Kab Garut dan kondisi faktualnya, secara khusus ditemukan tiga masalah fundamental yang saling berkaitan, adalah; pendapatan perkapita yang rendah sehingga daya beli menjadi lemah yang berdampak terhadap motivasi pendidikan yang tinggi, ditambah dengan PAD dan alokasi untuk pendidikan yang belum optimal. Rendahnya PAD berimplikasi terhadap perencanaan pembiayaan bidang pendidikan, sehingga hanya mampu merealisasikan pada pemenuhan fasilitas dasar pendidikan, antarlain: (1) mendorong pendidikan masyarakat berkelanjutan dengan memperkecil angka putus sekolah, (2) mendekatkan pendidikan dengan masyarakat terpencil, (3) menyekolahkan satu siswa miskin satu desa ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan mengurangi angka putus sekolah, (4) penjaminan lembaga pendidikan pada jenjang tertentu yang kredibel dan terakhir (5) merangsang anak berprestasi dari kalangan penduduk yang kurang mampu.

Selain itu penguatan penyediaan fasilitas literasi digital untuk Lembaga pendidikan dasar dan menengah secara umum belum merata dan lerlayani dengan baik, gratis atau sekurang-kurang dengan biaya yang murah dan terjangkau untuk seluruh kalangan. Keadaan tersebut menjadi salah satu faktor penghambat pendidikan berbasis digital di Garut. Dampaknya banyak siswa yang tidak mendapatkan hak dan jaminan layanan pendidikan yang bermutu dari sekolah.

Kontribusi Kepemimpinan Daerah terhadap Pendidikan yang Bermutu

Kepemimpinan memiliki peranan yang paling strategis dalam mewujudkan semua cita-cita pembangunan daerah dan sangat mudah untuk mengatasi berbagai permasalahan dan hambatan yang berkaitan dengan peningkatan sumberdaya manusia yang unggul di daerahnya.

Ukuran yang paling banyak digunakan untuk mengukur efektifitas pemimpin adalah seberapa jauh unit organisasi yang dipimpinnya berhasil menunaikan tugas dalam

mencapai sasarannya. Dalam beberapa kasus, kepemimpinan memiliki sifat untuk segera melakukan sesuatu dan suka menunda sesuatu yang akan dilakukan, dampak dari ketegesaan dan menunda suatu keputusan berimplikasi pada efektifitas tujuan dan sasaran organisasi pada jangka panjang. Gary Yukl dalam bukunya “Leadership In Organization” secara khusus meneliti tentang kepemimpinan yang efektif dalam mengelola organisasi di deskripsikan sebagai berikut.

Gambar 1. Rantai Perilaku Kepemimpinan



Gambar 1 di atas menjelaskan sebab dan akibat dari dua jenis perilaku pemimpin dengan harapan organisasi yang dikelolanya lebih efektif dan efisien. Selain efektifitas bisa mempercepat pencapaian sasaran pada organisasi, ada variable lain yang bisa mempengaruhi efektifitas kepemimpinan yakni : (1) karakteristik pemimpin, (2) karakteristik pengikut, dan (3) karakteristik situasi. Selain itu dalam pendekatan empirisnya ada 5 yaitu: (1) pendekatan ciri, (2) pendekatan perilaku, (3) pendekatan kekuasaan-pengaruh, (4) pendekatan situasional, dan (5) pendekatan terpadu (Yukl, 2009).

Mengacu pada deskripsi perilaku kepemimpinan di atas, kepemimpinan dalam mengelola organisasi harus efektif dan efisien, selain itu kecepatan dalam mengambil keputusan dalam mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu terkait dengan tiga masalah fundamental yang dapat menjadi salah satu faktor penghambat dalam bidang pendidikan, yaitu; pendapatan, daya beli dan rendahnya alokasi APBD untuk pendidikan, sehingga berdampak terhadap motivasi guru dan siswa dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi untuk segera diatasi melalui kebijakan yang cepat dan tepat, melalui percepatan penyediaan fasilitas literasi digital yang adil dan merata di wilayah Kabupaten Garut.

KESIMPULAN

Berdasarkan tema besar dalam tulisan ini, penulis dapat merumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut: *Pertama*; Gerakan *Literasi Digital* menjadi literasi baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk dalam bidang pendidikan harus menjadi salah satu prioritas pembangunan. *Kedua*, Kepemimpinan daerah memiliki kewajiban untuk menyediakan fasilitas yang memadai baik aspek struktur, infrastruktur, suprastruktur dan kultur melalui kebijakan yang berbasis program pembangunan *literasi digital* yang efektif, efisien dan berkelanjutan untuk kepentingan masyarakat secara luas. *Ketiga*, Selain aspek penyediaan infrastruktur, pemerintah juga harus menjamin ketersediaan komponen teknis dan non teknis bagi keberlanjutan program *literasi digital*

melalui kemitraan strategis dengan seluruh *stakeholder* agar dapat berdampak terhadap peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia di daerah khususnya bidang pendidikan dengan mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBD untuk pendidikan.

REFERENCES

- Akhirfiarta, T. B., 2017. Literasi Digital pada Pegawai RSUD dr. Soetomo Surabaya. *Jurnal Fisip Airlangga*.
- Anon., 2019. *Program Prioritas RKPD Tahun 2020 Lingkup Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan*. Garut: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Garut.
- Basri, J., 2019. *Analisis Implementasi Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) bagi Guru Sekolah Dasar*. Bandung(Jawa Barat): Jurnal Administrasi Pendidikan.
- Danuri, M., 2019. Perkembangan dan Transformasi Teknologi Digital. *Infokam (Informasi Komputer, Akutansi dan Manajemen)*, September, 15 (2), pp. 116-123.
- Kuswardani, D. A., 2021. Provinsi Jawa Barat dalam Angka 2021. Dalam: Bandung (Jawa Barat): Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, p. 468.
- Restianty, A., 2018. Literasi Digital, Sebuah Tantangan Baru Dalam Literasi Media. *Gunahumas*, Agustus, 1(1), pp. 72-87.
- Romansyah, A., 2017. *Lietrasi Digital (Reflesi Hari Aksara Internasional tahun 2017)*, Samarinda: BP-PAUD dan Dikmas Kalimantan Timur.
- Rumata, V. M. & Nugraha, D. A., 2020. Rendahnya tingkat perilaku digital ASN kementerian kominfo: Survei literasi digital pada instansi pemerintah. *Jurnal Studi Komunikasi*, Juli, Volume 4, pp. 467-484.
- Setiawan, A. B., 2018. Revolusi Bisnis Platfom sebagai Penggerak Ekonomi Digital di Indonesia. *Jurnal Masyarakat Telematika dan Informasi*, 9(1 Januari), pp. 61-76.
- Slamet, E., Harapan, E. & Wardiah, D., 2021. Pengaruh Literasi Digital Guru dan Motivasi Kepala Sekolah terhadap Keberhasilan Belajar di Rumah. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(1), pp. 774-778.
- Yukl, G., 2009. *Kepemimpinan dalam Organisasi*. Jakarta: P. Indeks.
- Yusuf, D. G., 2021. Kabupaten Garut dalam Angka 2021. Dalam: Garut: Badan Pusat Statistik Kabupaten Garut, pp. 242-284.